

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS
DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)

ARTIKEL



**OLEH
PUTRI IKASARI
11133100058**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

2015

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS
DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)

*Effect of General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Capital Expenditure to the
Local Financial Independen Level*

(The Study at the district town in Yogyakarta Special Region on 2007-2014)

Putri Ika Sari

Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta

Email : Putry_ikaa20@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is aimed to examine effect of general allocation fund, special allocation funds and capital expenditure on the local financial independen level. Each variable was tested partialneously. The Study was conducted at the district town in Yogyakarta Special Region.

The research using a secondary data such as general allocation fund, special allocation fund and capital expenditure from Yogyakarta Special Region on 2007-2014. This research is a quantitative research with multiple regression for testing the hypotheses. The data analyze by t-test with significance level $\alpha = 0,05$.

The result show that the general allocation fund giving positively effect and significant. A special allocation fund giving a negatively effect to local financial independen level. Capital expenditure giving a positively effect and not significant to local financial independen level.

Keywords: Local Financial Independen Level, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Masing-masing variabel diuji secara parsial. Penelitian dilakukan pada Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal dari Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2007-2014. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji regresi berganda untuk menguji hipotesis. Data dianalisis dengan menggunakan uji t dengan derajat signifikan $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu dengan adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut di tandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004, menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah

sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dimaksudkan agar Daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian Daerah dapat direalisasikan.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007). Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Diadakannya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh tiap Pemkab/Pemkot. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maka Pemkab/Pemko tersebut dapat dikatakan mandiri (Muliana, 2008). PAD itu sendiri merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan

daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD. PAD inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap beserta objek pajak dan retribusi yang taat. Sementara Bagi Hasil, DAU dan DAK serta berbagai bentuk transfer lainnya dari Pemerintah Pusat semestinya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri.

Namun terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya dengan pemberian dana alokasi umum (DAU). Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada dana alokasi umum (DAU) dibandingkan pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah. Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap

aliran transfer itu sendiri (Rizky dan Suryo, 2009). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2009) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan negatif, jika Dana alokasi umum bertambah atau meningkat maka akan mengurangi tingkat kemandirian daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah cenderung mempertahankan penerimaan DAU dikarenakan jumlahnya yang sangat besar daripada mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian sejenis dengan mengambil sampel Pemkab/Pemkot di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi DIY.”**.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta , 2) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupate/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 3) Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain : 1) bagi pemerintah daerah, sebagai masukan dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi pembangunan di masa yang akan datang, 2) bagi peneliti, untuk lebih mengetahui tentang tingkat kemandirian pemerintah daerah, 3) bagi akademisi, sebagai bahan bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya Akuntansi Sektor Publik.

B. LANDASAN TEORI

1. Kajian teori

a. Keuangan Daerah

Tercantum pada Pasal 1, Ayat 5 dari PP No. 58/2005 yang menyatakan bahwa keuangan daerah secara umum diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

b. Kemandirian Keuangan

Menurut Abdul Halim (2007), Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

c. Dana Alokasi Umum

Menurut Halim (2004), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

d. Belanja Modal

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53, Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Muliana (2009) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara”. Dengan hasil penelitian bahwa PAD mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAU dan DAK mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2013) yang berjudul “Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)”, menemukan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Ariani (2010) yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan *Tax Effort* (Studi Kasus pada Pemerintahan Kab/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta) ”, menemukan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan. Sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Pengembangan Hipotesis

a. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Sidik (2004) distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Jadi dengan kata lain, jika pemerintah pusat mengalokasikan DAU relatif besar maka daerah tersebut kurang mandiri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena PAD daerah tersebut kecil sehingga pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana kepada daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliana(2009) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika DAU yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih

mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya.

b. Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Yani (2002) Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, dengan kata lain daerah tersebut masih rendah pendapatan asli daerahnya dan juga masih harus berbenah diri untuk membangun daerahnya sendiri. Jika Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pemerintah pusat relatif besar maka daerah tersebut belum mandiri dari segi fiskalnya. Penelitian yang dilakukan Marizka (2013), menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil Dana Alokasi Khusus yang diterima daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin besar.

c. Hubungan Belanja Modal dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal memiliki karakteristik yang spesifik yang menunjukkan berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan di masa yang akan datang (Bati, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana (2013) menjelaskan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat

kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.

d. Hubungan Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal dengan Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah

Dengan otonomi daerah, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Temuan Prakoso dalam Rizky dan Suryo (2009) menunjukkan indikasi sebaliknya bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat, kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan dari pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

4. Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Hipotesis penelitian

H_1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

H_2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat

kemandirian keuangan daerah Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

H₃ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian korelasional karena penelitian ini melibatkan tindakan pengumpulan data dengan tujuan mengetahui pengaruh sebab akibat.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berupa laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2009-2013. Sampel seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada 5 Kabupaten/Kota.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1) dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari instansi yaitu yang diperoleh dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2) studi pustaka yang dilakukan di Universitas PGRI Yogyakarta, 3) tulisan dan penggunaan sistem komunikasi internet yang serta kaitannya dengan penelitian ini.

4. Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian pemerintah daerah. Variabel bebas (X) yaitu dana alokasi umum dan belanja modal. Penelitian dilakukan dengan Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis :

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji *One-Sample Test Kolmogorov-Smirnov* yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal.

2) Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan terikat dalam penelitian memiliki hubungan yang linier. Uji ini dilakukan dengan menggunakan garis regresi dengan taraf signifikansi 5%. Jika signifikansi lebih dari 5% maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linier.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF

= $1/\textit{tolerance}$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $\textit{tolerance} \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $\text{VIF} \geq 10$.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Glejser untuk melihat ketidaksamaan varian dari residualnya dengan taraf signifikansi 5%, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hubungan antar variabel dapat digambarkan dengan formula:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kemandirian Keuangan Pemda

a = Konstanta

b_1 = Koefisien Regresi DAU

b_2 = Koefisien Regresi DAK

b_3 = Koefisien Regresi Belanja Modal

X_1 = Dana Alokasi Umum

X_2 = Dana Alokasi Khusus

X_3 = Belanja Modal

ε = *error term model*

2) Koefisien Determinan

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen.

Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

3) Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi secara parsial.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan ilmu statistik yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian data suatu penelitian. Tujuannya adalah memudahkan orang untuk membaca data serta memahami maksudnya. Berikut ini merupakan statistik deskriptif yang merupakan keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. deviasi
Kemandirian	40	0,05	0,55	0,1805	0,13066
DAU	40	316.832	891.590	539.530,5	137.938,03
DAK	40	675	77.574	40.059,08	22.069,364
Belanja Modal	40	7.995	302.760	103.133,4	57.050,431

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2014

2) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Dari hasil pengumpulan data sekunder untuk dilakukan pengujian normalitas dengan menggunakan uji statistik yaitu Uji *One-Sampel Test Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

	Tolerance	VIF
DAU	0,614	1,628
DAK	0,816	1,225
Belanja Modal	0,573	1,746
Kolmogorov-smirnov = 0,630 Sig = 0,823 Durbin-watson = 1,525		

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2014

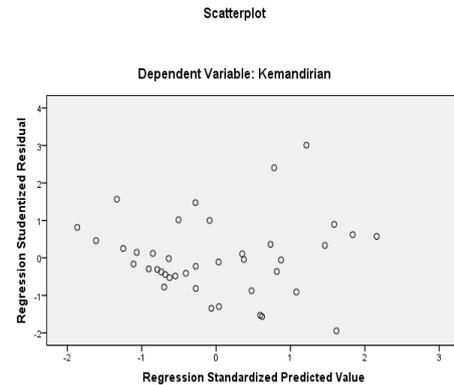
Hasil uji *One-Sampel Test Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel 2. Nilai *Kolmogorov-Smirnov* 0,630 dengan probabilitas signifikan 0,823 lebih dari $\alpha = 0,05$ hal ini berarti data terdistribusi secara normal, sehingga model regresi ini memenuhi uji normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini menjelaskan bahwa seluruh variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja modal memiliki angka *Variance Inflation Factors* (VIF) di bawah 10 dengan angka *tolerance* yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini didasarkan pada grafik *scatterplot* yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Sumber : Data sekunder diolah tahun 2014

Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar 2, dapat dilihat titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 1 hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai statistik Durbin Watson (DW) sebesar 1,525. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi karena nilai DW masih dalam angka -2 sampai +2.

3) Analisis Data

a. Analisis regresi berganda

Hasil regresi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	B	T	Sig
Constant	0,175	3,044	0,004
DAU	3,643E-7	2,866	0,007
DAK	-4,892E-6	-7,096	0,000
Belanja Modal	4,986E-8	0,157	0,876
F hitung : 18,451			0,000 ^a
Adjusted R ² : 0,573			

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2014

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diperoleh persamaan tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) sebagai berikut :

$$Y = 0,175 + 0,000000X_1 - 0,000004892X_2 + 0,00000004986X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = Tingkat Kemandirian Keuangan
 X_1 = Dana Alokasi Umum
 X_2 = Dana Alokasi Khusus
 X_3 = Belanja Modal
 ε = *error term model*

b. Koefisien Determinan

Hasil pengukuran koefisien determinasi pada tabel 3 memperlihatkan nilai adjusted R^2 sebesar 0,573. Hal ini menunjukkan 57,3% tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja modal. Sedangkan 42,7% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

c. Uji Statistik t

Berdasarkan tabel 3 dapat diambil kesimpulan bahwa dana alokasi umum mempunyai nilai $t = 2.865$ dengan nilai signifikan 0,007 yang lebih kecil dari 0,05 berarti hipotesis (H_2) ditolak. Dana alokasi khusus mempunyai nilai $t = -7.096$ dengan nilai signifikan 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 berarti hipotesis (H_2) diterima. Belanja modal mempunyai nilai $t = 0.157$ dengan nilai signifikan 0,876 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis (H_4) ditolak.

4) Pembahasan Hipotesis

a. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2009) yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan penjelasan diatas,

peneliti menduga bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dimana semakin besar DAU dari pemerintah pusat, maka tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi. Penggunaan dana transfer DAU yang efektif dan efisien untuk meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah daerah. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat merasa puas berdampak pada produktivitas dari sektor industri meningkat dan menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal. Perolehan pendapatan daerah yang semakin besar, maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri.

b. Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Kemandirian Keuangan daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Muliana (2009) yang menyatakan bahwa semakin besar transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan diatas, diduga bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi

urusan daerah serta untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah serta lingkungan hidup.

c. Hubungan Belanja Modal dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Pengeluaran belanja modal hendaknya dialokasikan untuk sarana dan prasarana yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah daerah harus mengakomodasikan kebutuhan publik dalam anggaran, kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran sebaiknya didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kenyataannya, pengeluaran belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien berarti pengeluaran belanja modal belum mencapai tujuan kepentingan publik serta penggunaannya belum menghasilkan output yang berdaya guna. Pengeluaran belanja modal belum digunakan untuk sektor-sektor publik yang dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pendapatan asli daerah, serta lebih digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan spekulatif, oleh sebab itu belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2010) tentang pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan *tax effort* (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Surakarta) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan hasil pengujian dan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- c. Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Saran

Beberapa saran yang bisa diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil sampel kabupaten dan kota di luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini dimaksudkan agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk kabupaten/kota di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel independen dalam penelitian.
- c. Periode penelitian yang digunakan oleh penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rentang waktu yang lebih besar/lebar

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, K. R. 2010. "Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Surakarta)". *Jurnal Akuntansi*, 1(2) Universitas Sebelas Maret : Surakarta.

- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat
- Marizka, Reza. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat*. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Muliana. 2009. *Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2005. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2005. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2005. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2005. Jakarta
- Rizky, I. dan Suryo P. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kota Kabupaten dan Provinsi di DIY)*. Makalah disampaikan dalam Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II, Bidakara.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Makalah disampaikan dalam Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, 13 Maret 2002.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara*. 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. 2003. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta.
- Yani, A. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.